

KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
MAYA NOVITA SARI
NIM. E42011022

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : Mayanovita.prodiip@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau yang belum optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kassubbag Pembinaan Keagamaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. Lima penerima dana hibah rumah ibadah, dan Auditor Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan yang menyebabkan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau kurang optimal dalam pelaporan pertanggungjawaban dana hibah rumah ibadah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan agar Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan sosialisasi terkait dana hibah rumah ibadah, Bagian Kesejahteraan Rakyat juga dapat membuat papan informasi, kotak saran dan memasukkan informasi hibah ke dalam website daerah agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah serta dapat bekerjasama dengan Kecamatan dan Desa untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah rumah ibadah dari penerima hibah.

Kata-kata Kunci : Kinerja, Dana Hibah, Rumah Ibadah dan Laporan Pertanggungjawaban.

THE PERFORMANCE OF SECTION OF CITIZEN'S WELFARE, DISTRICT SECRETARIAT, SANGGAU REGENCY

Abstract

The purpose of this research was to identify and analyze of performance in Section of Citizen's Welfare, District Secretariat, Sanggau Regency. Section of Citizen's Welfare, District Secretariat was not optimal to make accountability report. This research used an descriptive of qualitative model. Subject of the research were the head Section of Citizen's Welfare, District Secretariat, head Sub Section of development of religious life. This research result showed factor which have maked performance of Section of Citizen's Welfare not optimal. The recommendation of this research was socialization for receiver of grant foundation house of worship. Then, Section of Citizen's Welfare maked board information, suggestion box and website for for receiver

Key Word : Performance, Grant foundation, House of worship, Accountably report.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau terdiri dari oleh 3 asisten dan 9 bagian. Asisten Administrasi Pemerintahan dibantu oleh tiga bagian, yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pertanahan, dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asisten Adimistrasi Pembangunan dan Perekonomian dibantu oleh Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Organisasi.

Sebagai unsur pembantu Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian yang berada di bawah Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan tahun 2014 Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas memfasilitasi, memonitoring, mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragamaan, pembinaan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki tiga subbagian yang terdiri bagian kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragamaan, pembinaan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Bagian ini memiliki

tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Bagian kesejahteraan sosial menangani tentang bantuan sosial kepada masyarakat ataupun lembaga-lembaga. Bagian pembinaan kehidupan beragama menangani tentang ibadah haji, dana hibah rumah ibadah dan segala hal yang bersifat fasilitasi kehidupan beragama di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Bagian pembinaan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga menangani tentang beasiswa dan bantuan-bantuan pendidikan dan kepemudaan olahraga bagi sekolah-sekolah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun, pada pengamatan peneliti di lapangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai kendala khususnya pada bagian pembinaan kehidupan beragama yang menyebabkan kinerja Bagian Kesejahteraan terlihat belum optimal. Kendala yang dimaksud adalah tentang Penyaluran dana hibah yang diberikan kepada rumah ibadah. Rumah ibadah yang ada di Kabupaten Sanggau adalah masjid, surau, gereja, pura dan pekong. Dana hibah rumah ibadah ini bisa didapatkan oleh seluruh rumah ibadah dengan mengajukan proposal pengajuan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pemberian dana hibah rumah ibadah ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan dana pembangunan

rumah ibadah. Namun, pada pelaksanaannya dana hibah rumah ibadah yang telah diterima pengurus rumah ibadah tidak disertai dengan lancarnya pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh pengurus rumah ibadah. Hal ini terlihat dari hasil Rekap Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban terlihat ketidaksesuaian jumlah Surat Pertanggungjawaban yang seharusnya diterima oleh bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Penyampaian SPJ

No.	Tahun	Jumlah Penerima Hibah	Sudah SPJ	Belum SPJ
1.	2011	248	23	225
2.	2012	253	15	238
3.	2013	264	17	247

Sumber : Rekap Realisasi Penyampaian SPJ Tahun 2011, 2012, dan 2013

Data di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2013 bagian Kesejahteraan Rakyat selalu mengalami permasalahan yang sama yaitu tidak terselesaikannya Surat Pertanggungjawaban dari penerima hibah. Hal ini tentunya berhubungan terhadap tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana hibah rumah ibadah. Berdasarkan hal inilah peneliti tertarik untuk mengetahui mengapa setiap tahun

permasalahan Surat Pertanggungjawaban ini selalu terjadi.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan permasalahan, yaitu : “Mengapa kinerja bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dana hibah rumah ibadah belum optimal? ”.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kualitas kinerja bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Sanggau.

4. Manfaat Penelitian.

1) Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan dibidang analisis kebijakan publik.

2) Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan koreksi bagi kinerja kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Penelitian ini juga dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau meningkatkan kinerja organisasi.

- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan terutama berkenaan dengan kinerja bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Whittaker menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (dalam LAN, 2000). Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan

strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Donald dan Lawton (dalam Keban, 1995) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Meskipun penilaian kinerja telah berkembang dengan pesat, akan tetapi penggunaan penilaian kinerja dalam organisasi publik belum berkembang sebagaimana yang telah terjadi dalam sektor swasta. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja di organisasi publik belum merupakan tradisi yang populer (Keban, 1995), dan bahkan terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai kriteria

kinerja pelayanan publik (Dwiyanto, 1995:60).

Menurut Agus dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003:355) mengatakan “hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (tepat atau tidaknya). Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Indikator kinerja sangat diperlukan karena akan bermamfaat bagi banyak pihak. John Miner

(dalam Sudarmanto, 2009:11) mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu:

1. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan
2. Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu: waktu kerja efektif.
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja

Kemudian, Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto, 1995:98) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis yaitu responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Mengacu pada berbagai teori yang dijelaskan di atas dan dihubungkan dengan fenomena di lapangan (*actionable causes*), maka peneliti menganggap teori Agus Dharma relevan terhadap fenomena permasalahan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian

deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan serta fenomena secara mendalam penyaluran dana hibah dan penyampaian pelaporan Surat Pertanggungjawaban dana hibah rumah ibadah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian pada tiga faktor yaitu, Kualitas, Kuantitas dan Ketepatan Waktu.

1. Kualitas

Penunggakan SPJ yang terjadi pada tahun 2011, 2012, 2013 tentunya tidak ingin terjadi lagi pada tahun 2014. Pelaporan SPJ di tahun 2014 bisa diselesaikan dengan baik karena penerima dana hibah perbolehkan menyampaikan laporan realisasi di muka. Penyampaian laporan realisasi dimuka yaitu penyampaian SPJ dilakukan lebih awal yaitu sebelum pencairan dana. Penyampaian SPJ di muka ini dianggap tidak menyalahi aturan karena pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Berdasarkan pernyataan yang disampaikan

oleh Kasubbag Pembinaan Kehidupan Beragama bahwa setiap tahunnya selalu terjadi temuan BPK terkait pelaporan laporan realisasi dana hibah rumah ibadah yang belum diselesaikan oleh penerima hibah rumah ibadah. Pelaporan SPJ yang terlambat ini terjadi pada tahun 2011, 2012 dan 2013 namun mulai tahun 2014 hal ini sudah dapat diselesaikan. Penunggakan SPJ dana hibah rumah ibadah ini juga merupakan salah satu alasan mengapa sanggau tidak bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Kuantitas

Salah satu indikator dari kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Berdasarkan Rekapitulasi SPJ jumlah Penerima Dana hibah tahun 2011 berjumlah 248 rumah ibadah, namun masih terdapat 225 rumah ibadah yang belum menyelesaikan SPJ. Pada tahun 2012 ada 253 rumah ibadah yang menerima bantuan hibah ini, namun hanya 15 rumah ibadah yang sudah menyelesaikan SPJ bahkan hal yang sama juga terjadi pada tahun 2013, terdapat 264 rumah ibadah yang menerima bantuan namun hanya 17 rumah ibadah yang sudah menyelesaikan SPJ.

Peneliti merasa bahwa ada kurangnya koordinasi antara Kesra dan TAPD dalam penganggaran dana hibah rumah ibadah ini. Berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 48 Tahun 2012 pasal 16 menjelaskan bahwa dalam penganggaran Kepala SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada TAPD, selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan dan persetujuan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Pada penelitian ini peneliti kesulitan mencari data tentang besaran dana hibah rumah ibadah yang diterima setiap tahunnya.

Berdasarkan pernyataan dari Bagian Organisasi di atas terlihat bahwa bagian Organisasi menyadari bahwa beban kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat memang cukup besar dengan terbatasnya jumlah pegawai. Keterbatasan pegawai tersebut tidak juga dibantu oleh ketersediaan tenaga honorer. Bagian Organisasi tidak terlalu memandang terbatasnya jumlah pegawai di bagian Kesra sebagai masalah penting karena hal ini juga menjadi masalah diseluruh lingkungan kerja di Kabupaten Sanggau.

3. Ketepatan Waktu

Waktu yang ditetapkan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Keterlambatan bukan hanya terjadi pada saat pelaporan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dana saja namun terjadi mulai dari pengajuan proposal pengajuan dana hibah rumah ibadah yang

tidak diketahui jadwalnya oleh penerima rumah ibadah kemudian keterlambatan pencairan dana yang dikarenakan kesalahan koordinasi saat pembuatan SK penentuan unit penerima hibah sehingga terjadi perbedaan antara Kesra dan Bappeda hingga keterlambatan pengerjaan pembagunan rumah ibadah dan semuanya berujung pada keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran.

D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

- 1) Kualitas kerja dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau sudah masih terdapat kekurangan berupa adanya temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tidak baiknya laporan realisasi anggaran penyaluran dana hibah rumah ibadah yang dilaporkan Bagian Kesra kepada BPK periode 2011, 2012 dan 2013
- 2) Kuantitas kerja Bagian Kesejahteraan Daerah Kabupaten Sanggau sudah dinilai baik pula namun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Bagian Kesejahteraan

Rakyat tidak pernah melakukan monitoring ketika akan memastikan kebenaran peruntukan dana hibah rumah ibadah.

- 3) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan di Bagian Kesra masih memiliki kendala. Keterlambatan bukan hanya terjadi pada saat pelaporan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dana saja namun terjadi mulai dari pengajuan proposal pengajuan h kemudian keterlambatan pencairan hingga keterlambatan pengerjaan pembangunan rumah ibadah dan semuanya berujung pada keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran.

2. Saran

- 1) Memberdayakan pegawai yang ada yang disertai dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai.
- 2) Pelatihan atau sosialisasi khusus bagi Camat dan Kepala Desa untuk membuat proposal pengajuan dan laporan realisasi anggaran dalam mengantisipasi dari kurang minatnya masyarakat dalam menghadiri sosialisasi penyaluran dana hibah

- 3) Monitoring lapangan terkait kegiatan penyaluran dana hibah rumah ibadah agar tidak ada penyalahgunaan maupun kesalahan yang dilakukan masyarakat terkait penggunaan dana hibah rumah ibadah.

- 4) Penyebaran informasi tentang penyaluran dana hibah dalam bentuk papan informasi dan kotak saran agar masyarakat bisa mendapatkan informasi kapan saja, maupun dalam tampilan pada website daerah sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses informasi terkait hibah dimanapun dan kapanpun

3. Keterbatasan Penelitian

- 1) Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang berbenturan dengan waktu penyelesaian skripsi di semester (8) delapan menyebabkan peneliti tidak hanya terfokus pada penyelesaian skripsi tapi juga pada pelaksanaan KKM.
- 2) Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke bentuk tulisan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Atmosudirdjo, Pradjudi, 1997. *Menjawab Tantangan Masyarakat Indonesia Baru dalam Manajemen Pembangunan*, Nomor 19 Tahun V April, 11-19. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dharma, Agus, 2005. *Manajemen Kinerja-Filsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta. Pustaka Belajar

Dwiyanto, Agus. 1995. "Penilaian Kinerja Organisasi Publik". Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Mei.

Widodo, Joko. 2010. "Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja". Malang : Bayumedia Publishing. Governance.

....., 2001. "Good Governance Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi". Yogyakarta: Insan Cendekia.

Keban, Jeremias. T. 1995. "Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan", Makalah, Seminar Sehari, Fisipol UGM, Yogyakarta

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* : Jakarta.

Mardiasmo, 2001. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)*, Batam: Grafika.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura*. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Skripsi dan dokumen lainnya :

Besyeda. 2013. *Analisis Kebijakan Peyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kubu Raya* : Thesis. Program Pasca Sarjana Magister Universitas Tanjung Pura.

Lestari, Hesti. 2012. *Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang*: Skripsi. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Diponegoro.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Sanggau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Maya Novita Sari
NIM / Periode Lulus : E42011022 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : mayanovita.prodip@gmail.com / 085245950399

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
- content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Agustus 2015

(Maya Novita Sari)